

Sent: 30 April 2026

Received: 11 Mei 2026

Revised: 19 Juni 2026

Published: 23 Juni 2026

ANALISIS JARINGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SOCIAL NETWORK ANALYSIS IN HANDLING SCHOOL DROPOUTS IN NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY

Lucia Ela Haumen¹, Yoakim Rembu², Herminus Kefi³, Pionisius Minggu⁴¹⁻⁴Universitas Timor Kefamenanu; Kefamenanu, TTUE-mail: elahaumen@gmail.com

Abstract

This study aims to describe and analyze the role of social networks in managing school dropouts in North Central Timor (TTU) Regency using the social network theory perspective according to Granovetter (2005). The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants were selected purposively and consisted of elements of the Education Office, schools, social institutions, teachers, and parents. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and drawing conclusions supported by triangulation to ensure data validity. The results show that social networks involving the Education Office, schools, village governments, families, and social institutions have built cross-sector coordination and communication that supports the management of school dropouts. However, its effectiveness is still hampered by limited communication in remote areas, less than optimal involvement of all actors, and the existence of economic and non-economic barriers that affect the sustainability of children's education. This study concludes that strengthening collaborative social networks is a key factor in returning children to school. Therefore, it is recommended to improve coordination between institutions, expand data collection to remote areas, strengthen community-based assistance, and optimize educational support for vulnerable families.

Keywords: Social Networks; Handling; Dropout

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran jaringan sosial dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan menggunakan perspektif teori jaringan sosial menurut Granovetter (2005). Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, sekolah, lembaga sosial, guru, dan orang tua. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang didukung triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial yang melibatkan Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah desa, keluarga, dan lembaga sosial telah membangun koordinasi serta komunikasi lintas sektor yang mendukung penanganan anak putus sekolah. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan komunikasi di wilayah terpencil, belum

optimalnya keterlibatan seluruh aktor, dan adanya hambatan ekonomi maupun non-ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan jaringan sosial yang kolaboratif merupakan faktor kunci dalam mengembalikan anak ke bangku sekolah. Oleh karena itu, direkomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga, perluasan pendataan hingga daerah terpencil, penguatan pendampingan berbasis komunitas, serta optimalisasi dukungan pendidikan bagi keluarga rentan.

Kata Kunci: Jaringan Sosial; Penanganan; Putus Sekolah

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1) menegaskan bahwa *“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”* Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Selaras dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”* Dengan demikian, negara tidak hanya menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga mewajibkan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

Pendidikan bagi seorang anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persoalan mencerdaskan anak bangsa. Melalui pendidikan dapat diasah dengan seperangkat pengetahuan untuk memiliki kesadaran dan kemauan yang positif dalam menemukan dan merumuskan tujuan untuk dirinya pada masa-masa mendatang. Pembangunan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang lumayan besar, namun kasus tinggal kelas, terlambat masuk sekolah dasar, anak putus sekolah dan ketidakmampuan untuk meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi merupakan hal yang paling

banyak menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Dari beberapa masalah diatas, putus sekolah atau *Drop Out* (DO) menjadi masalah sosial yang kompleks karena memengaruhi individu, keluarga, masyarakat luas, dan menghambat proses pembangunan sumber daya manusia (Putra, 2024).

Penyebabnya beragam, mulai dari keinginan pribadi misalnya masalah Kesehatan Fisik dan Mental; (Majid, 2024) mengemukakan bahwa Penyakit kronis, disabilitas, atau masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan sering kali menghambat siswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Kemudian tekanan lingkungan sosial dan pergaulan; menurut Henry pengaruh teman sebaya yang negatif, seperti ajakan untuk membolos, terlibat narkoba, atau kegiatan kenakalan remaja lainnya, bisa memicu keputusan untuk meninggalkan sekolah. Selain itu kondisi ekonomi yang mendesak juga bisa menjadi pemicu anak putus sekolah (Adam et al., 2025). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mujiati et al., 2018) banyak siswa putus sekolah karena keterbatasan finansial keluarga meskipun ada bantuan dari pemerintah, akan tetapi tetap menyisakan kebutuhan lain seperti transportasi, seragam, buku, dan kebutuhan sehari-hari.

Dikabupaten Timor Tengah Utara (TTU), secara administratif terdiri dari 24 kecamatan. Merujuk pada hasil observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh peneliti di Dinas PPO Kabupaten TTU, angka putus sekolah tiga tahun terakhir untuk semua jenjang pendidikan yang ada di 24 kecamatan

mencapai 4.700 siswa untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten TTU Per Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Kec. kota kefamenanu	47	80	547
2.	Kec. Miomaffo Barat	25	48	256
3.	Kec. Miomaffo Timur	15	24	106
4	Kec. Miomaffo Tengah	50	90	120
5	Kec. Biboki Selatan	25	42	116
6	Kec. Biboki Utara	50	68	255
7	Kec. Biboki Feutleu	27	11	135
8	Kec. Biboki Moenleu	32	45	237
9	Kec. Biboki Tan Pah	10	30	104
10	Kec. Musi	20	60	92
11	Kec. Mutis	15	40	267
12	Kec. Insana	50	63	288
13	Kec. Insana Tengah	60	67	116
14	Kec. Insana Utara	13	40	150
15	Kec. Insana Barat	36	40	143
16	Kec. Insana Fafinesu	24	35	126
17	Kec. Noemuti	35	50	107
18	Kec. Noemuti Timur	21	47	250
19	Kec. Bikomi Utara	79	80	406
20	Kec. Bikomi Tengah	65	70	176
21	Kec. Bikomi Selatan	43	58	204
22	Kec. Naibenu	11	27	255
23	Kec. Nilulat	30	70	97
24	Kec. Miomaffo Utara	62	27	143
Jumlah		845	1.172	4.700

Sumber: Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten TTU (2024)

Berdasarkan tabel diatas jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren kenaikan yang sangat drastis. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 845 anak, meningkat menjadi 1.172 anak di tahun 2023, dan melonjak tajam hingga 4.700 anak pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam keberlangsungan pendidikan di Wilayah Kabupaten TTU. Dari 24 kecamatan yang ada, Kecamatan Kota Kefamenanu menjadi penyumbang angka putus sekolah tertinggi dengan total 547 anak pada tahun 2024, diikuti oleh Kecamatan Bikomi Utara dengan jumlah 406 anak. Sementara itu,

sisanya tersebar di 21 kecamatan lain dengan angka yang bervariasi namun tetap menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun permasalahan putus sekolah terjadi di seluruh wilayah Kabupaten TTU, namun Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Bikomi Utara menjadi dua kecamatan dengan jumlah angka putus sekolah tertinggi. Tingginya angka putus sekolah di kawasan pusat kabupaten ini menjadi ironi tersendiri, mengingat infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap dibanding kecamatan lain. Kondisi ini menjadikan lokasi tersebut sangat relevan dan signifikan untuk dijadikan fokus dalam penelitian, guna menggali akar permasalahan yang menyebabkan anak-anak berhenti sekolah di tengah kemudahan akses pendidikan yang seharusnya tersedia secara optimal.

Secara akademik, penelitian-penelitian sebelumnya juga sama-sama membahas tentang upaya penanganan anak putus sekolah tapi umumnya lebih menekankan pada aspek administratif dan kebijakan, mulai dari strategi pemerintah, implementasi kebijakan, dan kolaborasi lembaga dalam menangani anak putus sekolah, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mujiati et al., 2018; Sulistriani, 2021; Talakua, 2018), namun, belum banyak yang mendalami pendekatan sosial dan emosional yang dapat mendukung anak kembali bersekolah secara berkelanjutan.

Penelitian ini unik karena lebih berfokus pada analisis peran jaringan sosial seperti keluarga, masyarakat, komunitas, dan hubungan antar aktor sosial dalam membantu menangani serta mengembalikan anak putus sekolah ke dunia pendidikan di Kabupaten TTU dengan menggunakan

4 indikator jaringan sosial dalam penanganan anak putus sekolah menurut (Granovetter, 2005) yang terdiri dari:

1. Norma dan kepadatan jaringan (*network density*)
2. Lemah atau kuatnya ikatan (*ties*)
3. Peran lubang struktur (*structur holes*)
4. Interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Jaringan Sosial dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten TTU pada Dinas Pendidikan.

Melalui pendekatan jaringan sosial, diharapkan dapat di temukan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah anak putus sekolah. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Jaringan Sosial dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten TTU pada dinas pendidikan.

Kebaharuan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian yang meneliti beratkan pada peran jaringan sosial dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui keterlibatan pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga sosial. Penelitian ini juga menggunakan teori jaringan sosial Granovetter untuk menganalisis hubungan antar aktor dalam penanganan anak putus sekolah, sehingga tidak hanya berfokus pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kekuatan hubungan sosial, dukungan emosional, serta kolaborasi lintas sektor dalam mengembalikan anak ke dunia pendidikan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih

utuh, mendalam, dan realistis mengenai bagaimana jaringan sosial bekerja dalam menangani anak putus sekolah di Kabupaten TTU. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik “*purposive sampling*”. Berdasarkan hal tersebut informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TTU, Bapak admin dapodik dinas, LSM dari Amerika Serikat save the children, LSM Yayasan pijar timur Indonesia, Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua murid. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Miles & Huberman, 2009). Teknik validasi data dilakukan melalui triangulasi data, member checking, rich and thick description, peer debriefing, serta klarifikasi bias peneliti sebagaimana dikemukakan (Creswell, 2002).

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu September-November 2025, pada Dinas Pendidikan Kabupaten TTU dengan lokasi penelitian di SMA Negeri 2 Kefamenanu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis jaringan sosial dalam penanganan anak putus sekolah di kabupaten timor tengah dengan menggunakan teori jaringan sosial menurut (Granovetter, 2005), yang mencakup empat variabel utama, yaitu: Norma dan kepadatan jaringan, Lemah atau kuatnya ikatan, Peran lubang struktur, Dan Intrepretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi.

A. Norma dan Kepadatan Jaringan

Menurut (Granovetter, 2005), *Network density* atau kepadatan jaringan mengacu pada jumlah dan kekuatan hubungan antar anggota dalam suatu jaringan sosial. Semakin padat suatu jaringan, semakin banyak individu yang saling berinteraksi langsung satu sama lain. Norma sosial berfungsi sebagai pedoman perilaku antar aktor, sedangkan kepadatan jaringan menunjukkan seberapa sering dan erat aktor-aktor dalam jaringan tersebut saling berinteraksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tingkat keterhubungan antar aktor dalam jaringan sosial dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

Bapak Cendana Wangi Baksuni, yang menegaskan bahwa *“Penanganan anak putus sekolah kami lakukan dengan membangun kerja sama lintas sektor. Kami melibatkan sekolah, pemerintah desa, serta lembaga sosial seperti Save the Children dan Yayasan Pijar Timur Indonesia agar semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak yang berhenti sekolah (hasil wawancara pada tanggal 23 september 2025 di Kantor Dinas PPO)”*. Pernyataan ini menunjukkan adanya nilai tanggung jawab bersama, gotong royong, dan komitmen kolektif sebagai pedoman dalam bertindak.

Temuan tersebut diperkuat oleh jawaban Ibu Theresia Hendrika Tanesib yang menjelaskan bahwa *“Sekolah secara rutin melibatkan guru, masyarakat, tokoh adat, dan perangkat desa dalam membahas serta mencari solusi bagi anak putus sekolah (hasil wawancara pada*

tanggal 19 september 2025 di SMP N Maubeli)”.

Ibu Maria Yonetha Fai, Bapak Arkadius Y. Meomanu, Bapak Vinsensius Kia Beda, dan Ibu Sisilia Elfiana Halla juga menunjukkan bahwa *“Adanya kebiasaan koordinasi, komunikasi, partisipasi aktif, dan saling berbagi tanggung jawab dalam menangani anak putus sekolah”*.

Dari hasil wawancara diatas maka nilai norma sosial tercermin melalui tanggung jawab bersama, kerja sama, kepedulian terhadap pendidikan anak, dan komitmen kolektif yang dijalankan secara konsisten oleh para aktor yang terlibat.



Gambar 1
Pelaksanaan Kegiatan data dapodik

Dengan demikian norma sosial yang kuat dan padatnya jaringan yang tinggi telah membentuk pola kerja yang sama lintas sektor yang efektif di Kabupaten TTU. Jaringan sosial yang dikembangkan ini meningkatkan peluang anak untuk kembali bersekolah serta menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih peduli, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Kekuatan atau Kelemahan Ikatan

Menurut (Granovetter, 2005), Ikatan kuat memberikan dukungan emosional dan kepercayaan tinggi, serta memfasilitasi tindakan kolektif dalam kelompok kecil. Sedangkan Ikatan lemah penting karena menjembatani akses ke informasi baru yang tidak tersedia di dalam lingkaran ikatan kuat. Kuat dan lemahnya ikatan

dalam jaringan sosial ditentukan oleh intensitas interaksi, kedekatan emosional, serta frekuensi komunikasi antar aktor. Ikatan kuat biasanya terbentuk melalui hubungan yang intens dan berkelanjutan, sedangkan ikatan lemah terjalin melalui hubungan yang tidak terlalu sering, namun tetap memiliki peran penting dalam memperluas jaringan dan aliran informasi.

Untuk menilai kekuatan dan kelemahan hubungan dinas dengan sekolah dan tokoh masyarakat dalam menangani anak putus sekolah, berikut hasil wawancara dengan informan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan adanya kekuatan ikatan dan kelemahan ikatan dalam jaringan sosial penanganan anak putus sekolah di Kabupaten TTU. Ikatan kuat terlihat dari hubungan yang intensif, komunikasi yang berkelanjutan, serta adanya kepercayaan dan komitmen bersama antaraktor dalam menangani anak putus sekolah.

Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Cendana Wangi Baksuni yang menyatakan bahwa *“Dinas Pendidikan memiliki hubungan yang sangat baik dengan lembaga mitra seperti Yayasan Pijar Timur Indonesia dan Save the Children. Menurutnya, hubungan tersebut tidak hanya sebatas pelaksanaan program, tetapi telah berkembang menjadi komitmen bersama untuk memastikan tidak ada anak di Kabupaten TTU yang putus sekolah. Intensitas koordinasi dan kesamaan tujuan tersebut menunjukkan karakteristik ikatan kuat yang mendukung efektivitas kolaborasi antarlembaga (hasil wawancara pada tanggal 23 september 2025 di Kantor Dinas PPO)”*.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Bapak Vinsensius Kia Beda selaku Ketua Yayasan Pijar Timur Indonesia. Ia menjelaskan bahwa *“Yayasan*

berperan sebagai penghubung antara sekolah dan keluarga anak putus sekolah melalui komunikasi yang baik dengan dinas pendidikan dan guru-guru di sekolah. Kedekatan hubungan yang telah terbangun dalam jangka waktu lama menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga memudahkan proses pendampingan, kunjungan rumah, serta penyelesaian berbagai kasus anak putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan yang erat antaraktor mampu memperkuat koordinasi, mempercepat pertukaran informasi, dan meningkatkan efektivitas penanganan (hasil wawancara pada tanggal 10 November 2025 di Oelnitep, Kec. Tubuhe, Kab. TTU)”.

Selain itu, wawancara dengan Ibu Theresia Hendrika Tanesib dan Ibu Maria Yonetha Fai menunjukkan bahwa *“Hubungan antara guru dan siswa juga merupakan bentuk ikatan kuat. Interaksi yang berlangsung setiap hari memungkinkan guru mengenali perubahan perilaku, tingkat kehadiran, dan motivasi belajar siswa sejak dini sehingga risiko putus sekolah dapat dideteksi lebih cepat. Komunikasi rutin antara guru dan sebagian orang tua melalui pertemuan sekolah maupun kontak langsung turut memperkuat hubungan tersebut (hasil wawancara pada tanggal 19 september 2025 di SMP N Maubeli)”*.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya ikatan lemah dalam hubungan antara sekolah dan sebagian orang tua siswa, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan. Bapak Arkadius Y. Meomanu mengungkapkan bahwa *“Komunikasi dengan orang tua di desa sering kali kurang intens sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi secara langsung (hasil wawancara pada tanggal 23 september 2025 di SMA N*

2 Kefamenanu)”. Kondisi serupa juga disampaikan oleh Ibu Theresia Hendrika Tanesib dan Ibu Maria Yonetha Fai yang menyatakan bahwa *“Tidak semua orang tua dapat berpartisipasi aktif dalam komunikasi dengan pihak sekolah akibat faktor jarak, kesibukan, dan kondisi sosial ekonomi (hasil wawancara pada tanggal 19 september 2025 di SMP N Maubeli)”*.

Meskipun demikian, ikatan yang relatif lemah tersebut tetap memiliki peran penting sebagaimana dijelaskan Granovetter. Kehadiran lembaga sosial seperti Yayasan Pijar Timur Indonesia mampu menjembatani hubungan antara sekolah dan keluarga sehingga aliran informasi tetap berjalan dan proses pendampingan menjadi lebih efektif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Sisilia Elfiana Halla yang menyampaikan bahwa *“Ketika anak mengalami masalah di sekolah, ia berkomunikasi dengan guru, wali kelas, kepala sekolah, maupun tokoh masyarakat untuk memperoleh arahan dan dukungan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ikatan kuat berperan dalam membangun kepercayaan dan koordinasi yang intensif antaraktor utama, sedangkan ikatan lemah memperluas akses informasi dan membuka peluang kolaborasi melalui aktor penghubung sehingga keduanya saling melengkapi dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten TTU”*.



Gambar 2. Forum diskusi dan koordinasi terkait penanganan anak putus sekolah

C. Peran Lubang Struktural

Menurut (Granovetter, 2005), adalah celah dalam jaringan sosial, di mana dua kelompok atau individu tidak saling terhubung. Seseorang yang menghubungkan dua kelompok yang terpisah ini disebut sebagai broker atau jembatan sosial. Aktor yang mampu menjembatani lubang struktural memiliki peran penting dalam mengalirkan informasi dan sumber daya antar kelompok yang sebelumnya tidak terhubung secara langsung.

Keberadaan aktor penghubung antar kelompok terlihat dari pernyataan berikut:

“Beberapa sekolah yang berada di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengirimkan data secara cepat karena keterbatasan jaringan internet. Selain itu, ketergantungan pada sistem digital juga memperlihatkan adanya efek berantai, di mana satu hambatan teknis dapat memengaruhi keseluruhan proses pengelolaan data. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa sekolah bekerja sama dengan lembaga sosial atau pemerintah desa guna membantu proses pengiriman data melalui jaringan internet yang lebih stabil, sementara sekolah lainnya memilih menyampaikan data secara manual melalui komunikasi langsung kepada petugas Dapodik”.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara mengenai keterlibatan sekolah dalam kolaborasi dengan organisasi luar sekolah, yaitu:

“Sebagai guru, kami melihat bahwa ada pihak lain memiliki peran penting dalam menghubungkan sekolah dengan dukungan dari luar. Melalui koordinasi dengan dinas pendidikan, pemerintah desa, dan lembaga sosial, sekolah dapat membantu siswa yang mengalami kendala sosial maupun ekonomi sehingga mereka tetap dapat melanjutkan sekolah.”

Dari sisi lembaga sosial dari *Save the Children* Indonesia menjelaskan inovasi atau solusi baru berkaitan dengan masalah tersebut:

“Kami menemukan bahwa banyak kasus anak putus sekolah tidak dilaporkan karena lemahnya koordinasi antara pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, kami membentuk kader pendidikan anak di tiap kecamatan untuk menjadi jembatan informasi.”

D. Interpretasi Ekonomi dan Non-Ekonomi

Menurut (Granovetter, 2005), menolak pandangan ekonomi klasik yang menyatakan bahwa tindakan ekonomi bersifat rasional dan individual. Ia menyatakan bahwa tindakan ekonomi dan non-ekonomi selalu tertanam (*embedded*) dalam hubungan sosial. Keputusan ekonomi seperti jual beli, bekerja sama, atau berinvestasi tidak hanya didasarkan pada logika rasional, tetapi juga pada norma sosial, kepercayaan, dan relasi personal. Dengan kata lain, ekonomi tidak terlepas dari masyarakat, tetapi justru dibentuk oleh struktur sosial yang ada. Dalam penanganan anak putus sekolah, interpretasi ekonomi dan non-ekonomi dapat dilihat dari bentuk bantuan materi maupun dukungan sosial yang diberikan.

Dalam implementasi program, banyak yang menjadi hambatan baik itu dari faktor ekonomi maupun budaya lokal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan:

“Banyak anak putus sekolah disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah. Selain itu, faktor keluarga, lingkungan sosial, dan motivasi belajar anak juga turut mempengaruhi anak putus sekolah. Dalam beberapa keluarga, masih terdapat anggapan bahwa pendidikan belum menjadi prioritas utama dibandingkan membantu orang tua bekerja”

Cara sekolah mendeteksi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau berisiko putus sekolah dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti kunjungan rumah dan pemberian bimbingan belajar gratis. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi serta dukungan moral kepada siswa dan keluarganya agar tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Kami melakukan pendekatan seperti kunjungan rumah dan bimbingan belajar gratis. Hal ini kami lakukan untuk memberikan motivasi dan dukungan moral kepada siswa dan keluarganya. Kadang-kadang anak-anak kembali bersekolah bukan karena uang, tetapi karena merasa diperhatikan. Untuk anak yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk membantu mengakses bantuan program seperti PIP dan PKH agar anak-anak tersebut dapat kembali sekolah.”

Pembahasan

A. Norma dan Kepadatan Jaringan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat sudah terbentuk melalui adanya komunikasi dan koordinasi dalam penanganan anak putus sekolah. Namun, kepadatan jaringan tersebut belum optimal karena tidak semua aktor terlibat secara aktif.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan komunikasi dan koordinasi, terutama di wilayah terpencil. Dampaknya, informasi terkait anak putus sekolah tidak tersampaikan secara cepat dan penanganannya menjadi kurang maksimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Azizah et al., 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan penanganan anak putus sekolah sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi dan kerja sama antaraktor. Selain itu, (Talakua, 2018) juga menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dan lembaga mampu memperkuat jaringan masyarakat sosial dan meningkatkan efektivitas program penanganan anak putus sekolah. Namun apabila keterlibatan tersebut tidak dilakukan secara merata dan berkelanjutan, maka kepadatan jaringan menjadi rendah dan berdampak pada lemahnya implementasi program di lapangan.

B. Lemah atau kuatnya ikatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten TTU masih terdapat lubang struktural, khususnya antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat di wilayah tertentu, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi menyebabkan informasi terkait penanganan program anak putus sekolah belum tersampaikan secara merata. Akibatnya, beberapa anak yang berisiko putus sekolah belum mendapatkan pendampingan secara tepat waktu.

Dalam jaringan sosial ini, sekolah berperan sebagai penghubung (broker) antara pemerintah dan masyarakat.

Sekolah menjadi pihak yang menjembatani informasi mengenai anak putus sekolah kepada Dinas Pendidikan maupun kepada orang tua. Peran ini sangat penting karena membantu memperlancar alur komunikasi dan mempercepat proses penanganan anak putus sekolah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Azizah et al., 2025) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antaraktor dan keterbatasan data yang akurat merupakan bentuk lubang struktural dalam jaringan kebijakan pendidikan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tanpa adanya aktor penghubung yang efektif, penerapan kebijakan cenderung tidak optimal dan sulit menjangkau kelompok sasaran secara menyeluruh.

C. Peran Lubang Struktural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara masih terdapat lubang struktural, khususnya antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat di wilayah tertentu, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi menyebabkan informasi terkait penanganan program anak putus sekolah belum tersampaikan secara merata. Akibatnya, beberapa anak yang berisiko putus sekolah belum mendapatkan pendampingan secara tepat waktu.

Dalam jaringan sosial ini, sekolah berperan sebagai penghubung (broker) antara pemerintah dan masyarakat. Sekolah menjadi pihak yang menjembatani informasi mengenai anak putus sekolah kepada Dinas Pendidikan maupun kepada orang tua.

Peran ini sangat penting karena membantu memperlancar alur komunikasi dan mempercepat proses penanganan anak putus sekolah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Azizah et al., 2025) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antaraktor dan keterbatasan data yang akurat merupakan bentuk lubang struktural dalam jaringan kebijakan pendidikan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tanpa adanya aktor penghubung yang efektif, penerapan kebijakan cenderung tidak optimal dan sulit menjangkau kelompok sasaran secara menyeluruh.

D. Interpretasi Ekonomi dan Non-Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti keterbatasan pendapatan keluarga, kebutuhan anak untuk membantu orang tua, serta minimnya kemampuan keluarga dalam memenuhi biaya pendidikan, masih menjadi salah satu penyebab putus sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun demikian, faktor non-ekonomi seperti rendahnya motivasi belajar, kurangnya dukungan orang tua, lemahnya pengawasan, serta pengaruh lingkungan sosial juga berperan secara signifikan dalam mendorong terjadinya putus sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sulistriani, 2021) yang menyatakan bahwa strategi pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah tidak hanya dapat fokus pada pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan lingkungan keluarga.

Selain itu, penelitian (Azizah et al., 2025) juga menegaskan bahwa permasalahan anak putus sekolah merupakan permasalahan multidimensi yang melibatkan faktor ekonomi dan non-ekonomi secara bersamaan. Tanpa adanya pendekatan sosial yang menyentuh kesadaran keluarga dan perilaku anak, bantuan

ekonomi cenderung tidak memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap keberlangsungan pendidikan.

Jaringan sosial dalam penanganan anak putus sekolah memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Secara ekonomi, bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) membantu meringankan beban keluarga. Sementara itu, secara non-ekonomi, dukungan moral, motivasi, dan pendampingan dari guru serta masyarakat membantu meningkatkan kesadaran anak untuk kembali bersekolah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan anak putus sekolah di Kabupaten TTU sangat bergantung pada kekuatan jaringan sosial antara berbagai aktor seperti Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga sosial. Kerja sama lintas lembaga tersebut mampu mempercepat aliran informasi, memperkuat koordinasi, serta memberikan dukungan ekonomi maupun non-ekonomi kepada keluarga dan anak. Selain itu, keberadaan lembaga sosial juga berperan sebagai penghubung untuk mengatasi keterbatasan komunikasi di daerah terpencil. Dengan demikian, jaringan sosial yang kuat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengembalian anak ke bangku sekolah dan membangun sistem pendidikan yang inklusif serta berkelanjutan.

Saran

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTU Perlu memperkuat komunikasi antar lembaga, memperluas pendataan anak putus sekolah hingga daerah terpencil

- melalui sistem digital, serta meningkatkan kapasitas operator sekolah
2. Sekolah dan Tenaga Pendidik Perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua dan masyarakat serta melakukan pendekatan berbasis komunitas untuk mengantisipasi anak berisiko putus sekolah melalui konseling dan motivasi belajar
 3. Lembaga Sosial Diharapkan terus menjadi jembatan antara

- masyarakat dan pemerintah serta memperluas program pendampingan bagi anak dan keluarga miskin di bidang pendidikan
4. Masyarakat dan Orang Tua Perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. W. S., Samad, P., Pakaya, N., Rahma, A., Hapulu, M., & Fun, Y. G. (2025). Pengaruh Konformitas Remaja Dengan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Membolos Di Mts Al-Mubarak Marisa. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*, 3(1), 181–192. <https://doi.org/10.61132/Pragmatik.V3i1.1309>
- Azizah, N., Widowati, D., Yuswantoro, E., Wulan, N. R., Irawan, F. C., & Rini, D. P. S. (2025). Kolaborasi Multisektoral Dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah. *Cakrawala*, 19(2), 189–200.
- Creswell, J. W. (2002). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Kik Press.
- Granovetter, M. (2005). The Impact Of Social Structure On Economic Outcomes. *Journal Of Economic Perspectives*, 19(1), 33–50. <https://doi.org/10.1257/0895330053147958>
- Majid, A. (2024). Gangguan Psikologis Dalam Dunia Pendidikan: Mengupas Hubungan Gangguan Perilaku Dan Gangguan Belajar Pada Kesehatan Mental. *Jurnal Mitra*, 22(2).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Ui Press.
- Mujiati, M., Nasir, N., & Ashari, A. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 18(3), 271–281. <https://doi.org/10.30651/Didaktis.V18i3.1870>
- Putra, B. P. (2024). *Program Pendampingan Anak Putus Sekolah Berbasis Komunitas Laskar Belajar (Studi Di Kawasan Muharto Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/4158>
- Sulistriani, S. (2021). *Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Riau.

Talakua, Y. (2018). Peran Stakeholder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kota Ambon. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 1–16.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 Ayat (1)

UU No.1/1989 tentang pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat

(UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 54 ayat (1) tentang penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan formal dan nonformal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.